

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

Partisipasi Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Kosentrasi Pekerjaan Sosial untuk Meningkatkan Elektabilitas Profesi Pekerja Sosial di Masyarakat

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	Furqon,
Publisher	Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-06-12 16:34:56
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/161630

**Partisipasi Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Kosentrasi
Pekerjaan Sosial untuk Meningkatkan Elektabilitas Profesi Pekerja Sosial di
Masyarakat**

Oleh: Furqon, S. Sos. I
Mahasiswa Pascasarjana Kosentrasi Pekerjaan Sosial
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Bima Kurdo Sopen Yogyakarta
Email: itsmefurqon@gmail.com
Hp. 082 359 227 960

ABSTRAK

Salah satu bidang ilmu pengetahuan yang ditekuni oleh mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Kalijaga adalah Pekerjaan Sosial. Domain utama para Pekerja Sosial adalah dalam bidang kesejahteraan (*welfare*), seperti halnya dokter dalam bidang kesehatan dan guru dalam bidang pendidikan. Di Indonesia bidang ini sering disebut sebagai pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standard dan kualitas hidup manusia. Berangkat dari hal tersebut alumni yang mengambil kosentrasi dibidang ini membentuk sebuah kelompok yang bernama Ikatan Pekerja Sosial Profesional (IPSPI). Organisasi IPSPI sadar betul sebagai kelompok organisasi yang berperan dominan dalam sosialisasi mengenai profesi Pekerjaan Sosial ini, sehingga mahasiswa yang mengambil kosentrasi Pekerjaan Sosial ini merasa penting dan sadar untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Peran mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Kalijaga kosentrasi Pekerjaan Sosial dalam partisipasi untuk meningkatkan elektabilitas profesi Pekerjaan Sosial secara umum masih terbatas pada tahap pelaksanaan di kelas saja. Partisipasi yang ditunjukkan mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Kosentrasi Pekerjaan Sosial dalam meningkatkan elektabilitas profesi Pekerjaan Sosial di masyarakat masih belum dapat disebut partisipasi yang sesungguhnya, karena partisipasi mahasiswa UIN kosentrasi Pekerja Sosial belum memenuhi keseluruhan syarat kegiatan partisipasi yang ada. Ketidakberdayaan dan ketidakmampuan mahasiswa dalam mengelola hubungan yang baik antara pihak kampus untuk mensosialisasikan ke masyarakat tentang profesi ini dan juga ketidakadanya dukungan dari semua pihak menyulitkan mahasiswa untuk menentukan peran partisipasinya secara mandiri dalam meningkatkan elektabilitas profesi Pekerjaan Sosial di masyarakat.

Kata Kunci: Partisipasi, Mahasiswa, Pekerjaan Sosial, Elektabilitas, Profesi Pekerja Sosial

A. Pendahuluan

Pengembangan profesi pekerjaan sosial di Indonesia sudah saatnya menjadi perhatian yang sangat serius. Tentunya perjuangan pengembangan bidang praktek pekerjaan sosial tersebut disesuaikan dengan posisi peran dari masing-masing penggiat profesi pekerjaan sosial.

Selain itu juga, sebagai bagian dari perjuangan untuk pengembangan profesi pekerjaan sosial, mengingat jumlah lulusan dari program-program studi pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial di Indonesia masih minim. Maka perlu kiranya memperbanyak sekolah-sekolah atau prodi-prodi kesejahteraan sosial di Indonesia. Sementara itu juga persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat, muncul dengan kecepatan yang hampir tidak terkendali. Di tengah masih terdapatnya pandangan tradisional, baik di kalangan pemerintah dan masyarakat, yang mengakibatkan upaya-upaya penanganan masalah sosial menjadi tidak efektif. Seolah-olah penanganan masalah sosial dapat ditangani oleh siapapun yang hanya bermental peduli untuk terjun dan terlibat dalam pengentasan masalah sosial tersebut. Rasa peduli saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan (isu) sosial yang ada, diperlukan cara-cara yang sistematis dan profesional.

Namun, sebagai otokritik, ironisnya pula banyak lulusan-lulusan dari Perguruan Tinggi dengan Jurusan dan Program Studi Kesejahteraan sosial yang telah terjebak pada *status quo*, sudah nyaman dengan kondisi dan posisinya masing-masing saat ini. Sehingga tidak jarang, sebagai kecil dari mereka, para lulusan ini mempraktekkan cara-cara pendekatan yang tidak memandirikan masyarakat, terjebak pada ruang 'birokratis'-'administratif'. Mereka cenderung terjebak dengan cara-cara berfikir tradisional, tidak berupaya mengembangkan diri, hanya menjalankan hal-hal rutin keseharian, dan akibatnya banyak program-program kesejahteraan sosial yang dilakukan telah menimbulkan ekses negatif atau masalah sosial baru.

Negara ini sesungguhnya sangat mengapresiasi kehadiran pekerja sosial profesional, hal ini ditunjukkan dengan berbagai undang-undang, misalkan UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU no 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dan

beberapa rancangan undang-undang yang diusulkan untuk di-Undang-kan, seperti Rancangan Undang-Undang Disabilitas, dan Rancangan Undang-Undang Praktek Pekerjaan Sosial. Namun demikian suatu perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang baik, apabila penerapannya dilaksanakan secara konsisten. Sehingga kebutuhan dan penghargaan terhadap perlunya dan hadirnya para pekerja sosial di berbagai isu kesejahteraan sosial, yang bukan sekedar bersifat *curative* dan *rehabilitative* semata. Tetapi para pekerja sosial semestinya hadir di berbagai sektor sosial, yang kalau di pemerintahan bukan hanya di Kementerian Sosial saja, tetapi di berbagai kementerian lainnya sepanjang hal tersebut berkait dengan upaya-upaya fungsionalitas sosial atau pemberdayaan masyarakat. Saya fikir, kalau berbicara sektor pemerintahan, di hampir semua sektor pemerintahan para pekerja sosial dapat berkibrah, sesuai dengan ranah praktek minatnya; apakah akan aktif di ranah mikro, mezo atau makro; apakah ranah tersebut melakukan *treatment* atau pelayanan langsung (*direct service*) atau *treatment* tidak langsung (*indirect service*).¹

Pemerintah (legislatif, yudikatif dan khususnya eksekutif) Indonesia perlu selalu didorong, diingatkan dan disadarkan; bahwa negara-negara maju umumnya ditopang dan dilandasi dengan upaya-upaya penanganan isu-isu sosial (khususnya pada sisi preventif) yang dilakukan secara serius. Negara-negara maju umumnya menyadari, bahwa kemajuan-kemajuan ekonomi dan politik yang mereka peroleh sangat ditopang oleh kondisi sosial masyarakatnya yang mapan dan mandiri. Sehingga pembiayaan dan penghargaan terhadap segala upaya untuk memantapkan kondisi sosial masyarakat memang membutuhkan sumber yang besar. Artinya, dukungan pemerintah untuk melindungi profesi pekerjaan sosial di negeri ini sangat diperlukan dan mutlak adanya.

Di sektor swasta peluang praktek pekerjaan sosial jauh lebih luas dan terbuka. Bahkan penghargaan dan pengakuan lebih terasa diberikan oleh sektor swasta. Namun demikian, masyarakat awam pada umumnya masih memahami pekerja sosial sebagai kegiatan yang hanya bersifat karitas saja. Pengakuan penuh lebih dirasakan manakala terdapat beberapa NGO (*Non Government Organization*) Internasional yang terlibat kegiatan sosial di Indonesia. Mereka umumnya sudah memahami siapa itu pekerja sosial. Ketika bekerja dengan mereka, maka sangat terasa sekali begitu langkanya

¹ Lina lisnawati dkk, Eksistensi profesi pekerja sosial di Indonesia, Santoso Tri Raharjo (ed.), *Bidang praktek pekerjaan Sosial, kesejahteraan sosial, Profesi pekerjaan sosial* (Bandung : Unpad Pres, 2015), 397

para pekerja sosial Indonesia yang profesional. Sebab, seringkali pengelola organisasi non pemerintah (ornop) Internasional tersebut seringkali kesulitan mencari kualifikasi pekerja sosial yang dibutuhkan untuk menjalankan aktifitas sosialnya di Indonesia. Demikian pula, pada lembaga-lembaga swasta, khususnya perusahaan-perusahaan yang aktifitas kegiatannya berelasi dengan masyarakat lokalnya. Sehingga mereka sangat membutuhkan tenaga-tenaga profesional yang mampu membangun relasi yang harmonis melalui pendekatan-pendekatan sosial.

B. Review

Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.² Usaha-usaha pertolongan pekerjaan sosial dilakukan secara langsung atau tidak langsung, secara mandiri atau dalam kolaborasi dengan profesi lain.³ Dalam meningkatkan keberfungsian sosial, pekerja sosial fokus pada interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya⁴ agar masyarakat dapat berfungsi sosial secara efektif. Sebagai suatu aktivitas profesional, pekerjaan sosial di dasari oleh kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka keahlian (*body of skills*), dan kerangka nilai (*body of values*) yang secara integrative membentuk profil dan pendekatan pekerjaan sosial. Ketiga komponen tersebut dibentuk dan dikembangkan secara eklektik dari beberapa ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, antropologi, filsafat, politik dan ekonomi.⁵ Profesi pekerjaan sosial adalah yang pertama dalam pelayanan manusia yang memberikan fokus pada manusia dalam lingkungan sebagai suatu paradigma dalam asesmen dan perubahan.⁶ Sebagai ciri dari pekerjaan sosial ditandai oleh intervensi yang dilakukan oleh tenaga yang terdidik secara profesional, yang menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.⁷

² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial* (PT Refika Aditama: Bandung, 2009), hlm, 24

³ Adi Fahrudin, *Kesejahteraan Sosial Internasional* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 94.

⁴ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm, 26

⁵ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di duni Industri Mempekuat CST (Corporate Sosial Responsibility)*, (Alfabeta: Bandung, 2009), hlm, 2

⁶ Albert R. Roberts dan Gilbert J. Greene, *Buku Pintar Pekerja Sosial Jilid 2*. terj. Juda Damanik dan Cynthia Pattiasina (Jakarta: Gunung Mulia, 2009), hlm. xiii

⁷ Adi Fahrudin, *Kesejahteraan Sosial Internasional* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 92.

Masalah sosial sangat akrab dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia. Namun pendekatan untuk menyelesaikan secara praktis terhadap masalah sosial tersebut acap kali menggunakan kerangka keilmuan yang kurang pas, misalnya sosiologi, antropologi, ataupun psikologi. Tetapi bukan berada beberapa disiplin keilmuan diatas tidak berguna dalam penyelesaian masalah sosial. Hanya saja, sebenarnya sudah ada suatu disiplin ilmu yang secara spesifik memberikan panduan dalam proses penyelesaian masalah sosial. Disiplin ilmu yang dimaksud adalah pekerjaan sosial (kesejahteraan sosial).

Krisis profesi pekerjaan sosial di tunjukkan dengan tergantikannya profesi pekerjaan sosial oleh orang-orang yang bukan berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial (kesejahteraan sosial). Tidak salah, hanya di khawatirkan terjadinya malpraktek, sehingga penyelesaian masalah kontraproduktif, karena tidak adanya pengetahuan tentang pekerjaan sosial yang memadai. Krisis profesionalitas ini semakin tampak dengan adanya perdebatan yang sengit pada tahun 2008 khususnya terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial sebagai pengganti UU No. 6 Tahun 1974. Bahkan, hingga RUU itu disahkan pada 18 Desember 2008 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, masih saja tersisa beberapa perdebatan.⁸

Salah satu perdebatan tersebut yakni menyangkut siapa yang disebut pekerja sosial itu. Beberapa kalangan memberikan definisi secara longgar bahwa pekerjaan sosial tidak harus berlatar belakang dari pendidikan pekerjaan sosial. Sedangkan yang lain lebih ketat bahwa pekerjaan sosial adalah seorang ahli yang berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial.

Namun yang ironis ada beberapa kalangan yang tidak mengetahui bahwa pekerjaan sosial itu sebagai disiplin ilmu. Bahkan konon anggota DPR yang terhormat ada yang tidak mengetahui bahwa pekerjaan sosial (kesejahteraan sosial) merupakan disiplin ilmu. Ini artinya perlu diperjelas di khalayak ramai bahwa pekerjaan sosial bukanlah suatu istilah yang tidak memiliki landasan teoritik yang bersidat akademik.

Pekerjaan sosial adalah sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam definisi yang lain pekerjaan sosial merupakan sebuah aktivitas profesional dalam menolong

⁸ Ibid., hlm. 9

individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan untuk mencapai kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif dalam mencapai tujuannya.⁹

Sebagai aktivitas pertolongan (*helping profession*) pekerjaan sosial bermaksud untuk menyelesaikan masalah sosial yang terjadi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Layaknya dokter atau guru, sebagai aktivitas yang profesional, pekerjaan sosial didasari oleh tiga kompetensi penting yakni kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka keahlian (*body of skill*) dan kerangka nilai (*body of value*). Secara integratif ketiganya menjadi dasar penting dalam praktik ilmu pekerjaan sosial.

Dari definisi yang dipaparkan diatas, dapat dilihat bahwa pekerjaan sosial adalah sebuah disiplin ilmu yang berkepentingan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang dihadapi umat manusia. Artinya secara operasional pekerjaan sosial pada dasarnya sangat dekat dengan kehidupan setiap masyarakat. Walaupun demikian perlu diakui bahwa secara definitif pekerjaan sosial relatif kurang dikenal dalam masyarakat Indonesia.

Kurangnya dikenal ilmu pekerjaan sosial di masyarakat Indonesia mungkin dapat dipahami, sebab ilmu ini lahir dan berkembang di Barat. Akan tetapi pekerjaan sosial tidak relevan dikembangkan di Indonesia. Sebab fokus kajian pekerjaan sosial adalah membantu orang, keluarga, kelompok ataupun masyarakat yang mengalami kesulitan. Indonesia sebagai negara yang berkembang dengan kehidupan ekonomi yang masih cukup memprihatinkan, tentu saja pekerjaan sosial berperan sangat strategis dalam upaya memecahkan berbagai permasalahan sosial di negeri ini.

Ada banyak faktor yang menyebabkan kurang populernya profesi ini. Untuk menyebut diantaranya: pertama, istilah yang dipakai kurang spesifik dan kurang tegas. Istilah yang spesifik dan tegas ditunjukkan misalnya pada profesi dokter (dalam dunia kedokteran) atau guru (dalam dunia pendidikan). Tetapi pekerjaan sosial (*social worker*) justru identik dengan pekerjaan sukarela dan tidak profesional. Karena itulah banyak kalangan yang mencari istilah yang pas bagi pekerjaan sosial ini. Contohnya Edi Suharto mencoba menamakan pekerjaan sosial sebagai sosiawan atau sosiater. Sekalipun demikian, belum banyak penekun ilmu ini secara masif menggunakan istilah tersebut. Pekerja sosial juga identik dengan kiprah para aktivis NGO atau

⁹ *Ibid.*, hlm 12

LSM, misalnya Muna Madrah seorang yang pernah bekerja di LSM yang bergerak di bidang kemanusiaan menyebut dirinya sebagai “pekerjaan kemanusiaan” (*humanitarian worker*) dari sini istilah pekerja sosial memang agak kabur dan tidak baku, khususnya di kalangan masyarakat Indonesia.

Kedua, menyangkut stigma. Seperti yang dijelaskan di atas, pekerjaan sosial identik dengan pekerjaan suka rela, tidak dibayar, sehingga muncul kesan tidak profesional. Akibatnya profesi ini kurang dihargai dan tentu saja tidak banyak diminati. Lebih ironis banyak kalangan malu menyebut diri sebagai pekerja sosial karena stigma negatif ini. padahal anggapan semacam ini tidak sepenuhnya benar, bahkan pekerja sosial di negara berkembang seperti Indonesia ini dapat menjadi profesi yang sangat menjanjikan seperti halnya di negara-negara maju.

Terakhir, profesi ini dalam prakteknya tergantikan oleh profesi lain. Misalnya, di masyarakat yang menjunjung tinggi nilai suatu adat, profesi ini diperankan oleh tokoh-tokoh adat. Tidak heran apabila ada masalah yang menyangkut seseorang, keluarga atau masyarakat, biasanya diselesaikan oleh ketua adat atau tokoh tertentu yang berpengaruh. Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas Islam, peran-peran yang mestinya dijalankan oleh pekerja sosial tergantikannya peran ini pada seorang ulama. Penulis tidak bermaksud mengatakan bahwa profesi-profesi yang menggantikan peran pekerja sosial itu buruk, justru ini sebuah potensi untuk lebih memasyarakatkan profesi tersebut. Sebab jika diamati secara teliti pada dasarnya profesi pekerjaan sosial sudah ada tinggal bagaimana melakukan revitalisasi terhadap profesi-profesi yang menggantikan peran pekerja sosial tersebut. Ini adalah agenda besar dalam wacana ilmu pekerjaan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Melihat partisipasi mahasiswa Pekerja sosial dalam meningkatkan elektabilitas profesi pekerja sosial; 2) bagaimana elektabilitas profesi pekerja sosial di masyarakat.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampus pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif¹⁰ dengan jenis penelitian studi kasus tunggal terpancang untuk mendiskripsikan Partisipasi Mahasiswa Pascasarjana Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta Kosentrasi Pekerjaan Sosial

¹⁰ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm.3.

Untuk Meningkatkan Elektabilitas Profesi Pekerja Sosial Di Masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dan observasi¹¹ langsung. Peneliti mengambil cuplikan dengan *purposive sampling* untuk menentukan informan, yaitu Dosen pengampu, staff akademik dan mahasiswa pascasarjana konsentrasi Pekerja Sosial. Peneliti mengambil cuplikan dengan *snowball sampling* untuk menentukan informan mahasiswa sebagai partisipan dalam meningkatkan elektabilitas profesi pekerjaan sosial di masyarakat. Teknik yang digunakan untuk menguji validitas data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data. Peneliti menggunakan model analisis data interaktif untuk menganalisis data temuan penelitian. Data yang tidak valid dan tidak dibutuhkan disaring untuk mempermudah *display data* dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dipilih dan disaring dikategorikan berdasarkan permasalahan penelitian. Peneliti selanjutnya menarik kesimpulan akhir berdasarkan data yang telah ditampilkan sesuai dengan rumusan masalah.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Partisipasi Mahasiswa Pekerja Sosial

Sebagian besar bentuk partisipasi yang ditunjukkan oleh mahasiswa pascasarjana konsentrasi pekerjaan sosial dipengaruhi oleh adanya peran dari pihak luar (eksternal), keterlibatan mahasiswa pekerja sosial dalam kegiatan untuk meningkatkan elektabilitas profesi pekerja sosial, antara lain:

Kaprodi IIS mengupayakan program bimbingan pelatihan yang terkait dengan pengembangan profesi pekerjaan sosial bagi seluruh mahasiswa pekerjaan sosial dan disitu mahasiswa turut serta mengikutinya.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga juga mengupayakan keterlibatan mahasiswa pekerja sosial dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti bekerjasama dengan pihak luar kampus dalam kepelatihan maupun kegiatan-kegiatan langsung seperti praktek kerja lapangan (PKL) dengan lembaga –lembaga sosial. Dan juga dibentuknya undang-undang kesejahteraan sosial di pemerintah. Sebagian besar mahasiswa selalu ikut dalam kegiatan yang dibuat oleh jurusan tersebut.

Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) sebagai organisasi yang berjuang agar profesi ini di perhatikan oleh pemerintah memiliki peran yang hampir sama dengan pihak jurusan IIS konsentrasi Pekerjaan Sosial yaitu sosialisasi tentang keberadaan profesi pekerja sosial di masyarakat sebagai profesi yang mampu dan bisa

¹¹ Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2004), hlm. 70.

menyelesaikan masalah sosial di tengah-tengah masyarakat. Lebih lanjut IPSPI terus mengupayakan agar mahasiswa pekerja sosial terus mengadakan kegiatan dan kepelatihan, sehingga disini mahasiswa pekerja sosial menjadi sadar akan pentingnya profesi ini di tengah masyarakat agar profesi ini terus dipandang penting dalam membantu memecahkan masalah serta menunjukkan bagaimana menciptakan citra yang baik melalui tata cara bertingkah laku serta mengikuti pelatihan guna membangun kemampuan diri untuk menunjang eletabilitas profesi pekerja sosial di masyarakat.

Peran dari kampus secara umum adalah dengan mendukung dan mengawasi setiap kegiatan mahasiswa pekerja sosial. Citra positif dari masyarakat dengan kegiatan-kegiatan positif akan mampu terbentuk dengan kegiatan tersebut. Kerjasama ini terlihat pula dalam setiap kegiatan.

Peran mandiri ditunjukkan mahasiswa dalam bentuk mengabdikan diri kepada lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat. Banyak sektor-sektor swasta mencoba menawarkan kepada mahasiswa pekerja sosial untuk bisa menyalurkan ilmunya agar dikenal oleh banyak orang disitulah mahasiswa mencoba berperan dan menjelaskan keberadaan profesi pekerjaan sosial.

Para staf pengajar program-program studi kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial di UIN Sunan Kalijaga, yang akan melahirkan para pekerja sosial profesional; baik yang *expert* dalam ranah mikro, meso, maupun makro. Maka, para staf pengajar (dosen) ini memiliki tanggung jawab profesional untuk terus mengembangkan diri dalam keilmuan pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial, yang untuk selanjutnya ditularkan kepada para mahasiswanya. Sebab, hal ini selain sebagai tanggung jawab profesional sebagai pekerja sosial yang melekat pada diri, juga merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai pendidik profesional.

Pada semester awal mahasiswa diperkenalkan dengan berbagai isu-isu yang sedang hangat terjadi di masyarakat dengan mata kuliah isu-isu kontemporer. Mahasiswa mencoba berselancar dan mengeksplor lebih dalam lagi tentang isu-isu yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat saat ini sehingga mahasiswa tahu bagaimana menghadapi isu-isu tersebut dan mampu menyelesaikan masalah dengan proffesional.

Ada beberapa dosen tamu yang dihadirkan pada mata kuliah isu-isu kontemporer ini. dosen-dosen tamu ini merupakan orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Kehadiran dosen tamu ini guna menunjang pengetahuan

dan pemahaman serta keahlian mahasiswa pekerja sosial, isu-isu yang di bahas adalah sebagai berikut:

Pertama, kehadiran Bu Nurul Eka dari IPSPI yang mengangkat isu tentang kesehatan mental menambah pemahaman mahasiswa tentang kesehatan mental di Indonesia. Isu kesehatan mental sangatlah sensitif dikalangan masyarakat Indonesia. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kesehatan mental sangatlah kurang. Riskesdas pada Tahun 2013 ada mencatat bahwa ada 400.000 penderita gangguan jiwa berat di Indonesia 57.000 orang masih di pasung 1 dari 9 penderita skizofrenia tidak mendapatkan pengobatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat Indonesia tentang kesehatan mental masih kurang dan perlu adanya pertolongan dari profesi pekerja sosial.

Kedua, Maria Widagdo seorang Dokter dan dosen dari Universitas Kristen Duta Wacana mengangkat isu permasalahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Jaminan kesehatan nasional (JKN) belum berjalan dengan baik. Meskipun kebijakan pemerintah ini membantu masyarakat yang golongan tidak mampu untuk mendapatkan akses pengobatan yang baik dari rumah sakit. Namun sejalan dengan hal itu JKN tidak bisa berjalan dengan mulus seperti yang diharapkan karena masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Ketiga, Eko Prasetyo seorang Praktisi pekerja sosial di Panti Rehabilitasi Parmadi Putra Yogyakarta penanganan korban NAPZA. Penggunaan zat adiktif masih menjadi tren dikalangan masyarakat Indonesia terutama dikalangan pemuda dan pelajar. Hal ini perlu di perhatikan juga dalam membantu menyelesaikan permasalahan para pengguna zat adiktif.

Keempat, Abdur Rozaki yang merupakan Dosen UIN Sunan Kalijaga sekaligus seorang birokrat ini memberikan sedikit pengetahuan tentang Aset based Community Development bagaimana menjadi seorang pekerja sosial harus jeli melihat peluang dalam mengembangkan kemampuan komunitas yang tertinggal sehingga komunitas atau masyarakat desa tersebut mampu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desanya.

Kehadiran dosen tamu sebagai alat untuk menambah dan mengembangkan pemahaman keilmuan pekerja sosial, selain itu mahasiswa dapat mengaplikasikan pemahaman yang didapat di lembaga nantinya. Partisipasi yang dilakukan mahasiswa pekerja sosial merupakan bentuk apresiasi mahasiswa terhadap konsentrasi pekerja

sosial, sehingga dengan bertambahnya ilmu tersebut mampu menepis isu yang tengah terjadi di dalam masyarakat nantinya.

Partisipasi mahasiswa ini tidak dengan mudahnya terjadi, maka sebelumnya perlu diketahui bagaimana proses partisipasi mahasiswa ini berlangsung hingga mahasiswa mampu bergerak secara mandiri.

Pembinaan terhadap mahasiswa menjadi sebuah keharusan yang perlu dilakukan untuk pencapaian tujuan jangka panjang sehingga mahasiswa pekerja sosial menjadi mahasiswa yang mampu menerapkan kelimuaannya secara profesional. Pembinaan mengenai seluk beluk partisipasi dapat menjadi hal mendasar yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa pekerja sosial memaknai pentingnya sebuah partisipasi. Pemahaman mengenai partisipasi yang salah sering menjadi permasalahan dalam upaya mencapai tujuan dari pembangunan yang partisipatif.

Pada kondisi saat ini, sebagian besar partisipasi mahasiswa pekerja sosial hanya terlihat dari keikutsertaan dalam pelaksanaan program pelaksanaan kegiatan kuliah yang dapat dilihat secara fisik. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa pekerja sosial masih mengartikan partisipasi hanya sebatas kegiatan keikutsertaan dalam kuliah di kelas. Mereka kurang diikutsertakan dalam kegiatan partisipasi yang lebih kompleks seperti ikut dalam pengambilan keputusan dan pemantauan maupun kegiatan evaluasi pelaksanaan suatu program.

Mahasiswa pekerja sosial memiliki keterbatasan mengembangkan gagasannya dalam hal perencanaan pengembangan kegiatan di kampus. Mahasiswa sebenarnya tidak pasif hanya mengikuti pelaksanaan saja. Mahasiswa pekerja sosial juga pernah menyumbangkan beberapa gagasan dalam perencanaan untuk penunjang pengembangan kegiatan-kegiatan di kampus. Namun keterbatasan menyebabkan mereka tidak memiliki cukup kekuatan atau wewenang untuk merealisasikannya secara mandiri. Gagasan mahasiswa pekerja sosial masih dianggap sebagai keinginan semata sehingga memiliki prioritas rendah untuk diwujudkan.

Elektabilitas Profesi Pekerjaan Sosial

Elektabilitas Profesi Pekerjaan Sosial telah memasuki tahapan penting dan strategis dalam rangka memperkuat perkembangan Pekerja Sosial di Indonesia, antara lain: *Pertama*, semakin kuatnya pengaturan Pekerja Sosial Profesional dalam Peraturan Perundang-undangan, seperti dalam UU No No 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan Pekerja Sosial sebagai “the primary profession” dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menjadi landasan kuat untuk penyediaan Pekerja Sosial profesional di Indonesia.

Kedua, Pekerja Sosial telah memasuki era baru yaitu Sertifikasi Kompetensi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dicanangkan oleh Menteri Sosial RI pada tanggal 29 November tahun 2012 di Jakarta. Sertifikasi difasilitasi oleh pemerintah melalui Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial (LSPS) yang merupakan pengakuan terhadap Pekerja Sosial dan pada gilirannya menerbitkan lisensi. Demikian juga untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial yang akan di akreditasi oleh badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) hal ini dapat memperkuat eksistensi profesi Pekerja Sosial.

Ketiga, kementerian Sosial memprakarsai penyusunan naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Pekerjaan Sosial yang saat ini sudah di bahas ditingkat panja Komisi VIII DPR RI yang merumuskan secara legal definisi Pekerjaan Sosial dan praktik Pekerjaan Sosial, persyaratan menjadi Pekerja Sosial, jenjang pendidikan, kedudukan, tugas dan fungsinya, sertifikasi, keberadaan asosiasi profesi, asosiasi pendidikan dan kewajiban lembaga kesejahteraan pelayanan sosial untuk menggunakan Pekerja Sosial bersertifikat dan berlisensi.

Keempat, kebijakan saat ini yang menjadi arus utama Kementerian Sosial adalah “one stop services” dengan mengintegrasikan pelayanan pada satu sistem dengan dicanangkan Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera atau PANDU GEMPITA, hal ini dilaksanakan di 5 (lima) wilayah yaitu Kota Sukabumi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Sragen, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Berau. Pekerja Sosial menjadi garda terdepan sebagai profesi utama untuk berbagai program Pandu Gempita.¹²

Saat ini kebutuhan tenaga profesional di bidang Pekerjaan Sosial masih sangat besar mengingat estimasi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2013 sekitar 15,5 juta rumah tangga, sedangkan jumlah Pekerja Sosial yang baru sekitar 15.522 orang. Jika ratio ideal misalnya 1 Pekerja Sosial menangani 100 rumah tangga, maka masih dibutuhkan kurang lebih 139.000 orang Pekerja Sosial. Begitu

¹² Kementerian sosial dalam

<http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=17908>, di akses tanggal 27 Oktober 2016.

pula dibutuhkan Pekerja Sosial medis di rumah sakit, Pekerja Sosial Industri, Pekerja Sosial Forensik di Lapas/Bapas, Pekerja Sosial Klinis di Lembaga-Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Pekerja Sosial Spesialis Perlindungan anak, Pekerja Sosial Spesialis Manajemen Bencana dan sebagainya. Konferensi ini diharapkan dapat memberikan penguatan terhadap profesi Pekerjaan Sosial berupa Rencana Aksi Nasional atau Roadmap Pengembangan Pekerjaan Sosial di Indonesia.

E. Penutup

Keberadaan mahasiswa yang berpartisipasi dalam kegiatan kampus merupakan salah satu solusi dari upaya pemberdayaan mahasiswa pekerja sosial agar menjadi profesional. Sebab mahasiswa dengan segala potensinya diharapkan mampu menerapkan seluruh ilmu dan kemampuannya di masyarakat dan mampu memberikan solusi dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Seorang Pekerja Sosial Profesional, dalam melaksanakan Intervensinya terhadap Klien, harus didasarkan kepada 3 Kerangka Pekerjaan Sosial, yaitu: ilmu pengetahuan, keahlian/keterampilan dan nilai-nilai. Untuk meningkatkan keberfungsian sosial Klien. Pekerja Sosial juga diharuskan untuk memahami tentang teknik komunikasi dan berelasi dalam Pekerjaan Sosial, memahami langkah-langkah intervensi sehingga masalah Klien dapat diselesaikan dengan tepat. Oleh karenanya kehadiran Profesi Pekerjaan Sosial sangatlah dibutuhkan didalam masyarakat. Apalagi dengan semakin kompleksnya kehidupan kita, jelas semakin banyak timbul masalah-masalah baik yang sifatnya individu, ataupun kolektif.

Daftar Pustaka

- Lina lisnawati dkk, Eksistensi profesi pekerja sosial di Indonesia, Santoso Tri Raharjo (ed.), *Bidang praktek pekerjaan Sosial, kesejahteraan sosial, Profesi pekerjaan sosial* Bandung : Unpad Pres, 2015
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial* (PT Refika Aditama: Bandung, 2009
- Adi Fahrudin, *Kesejahteraan Sosial Internasional* Bandung: Alfabeta, 2012
- Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di duni Industri Mempekuat CST (Corporate Sosial Responsibility)*, Alfabeta: Bandung, 2009
- Albert R. Roberts dan Gilbert J. Greene, *Buku Pintar Pekerja Sosial Jilid 2*. terj. Judo Damanik dan Cynthia Pattiasina Jakarta: Gunung Mulia, 2009
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010
- Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Bumi Aksara, 2004
- Kementrian sosial dalam <http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=17908>, di akses tanggal 27 Oktober 2016.